

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN
PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PPDB TAHUN 2022 DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

OLEH:

**RAHMA FITRI NINGSIH
1910842025**

Pembimbing I:

- 1. Muhammad Ihsan Kabullah, S.IP, M.PA**
NIP. 19850904200912
- 2. Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.sc**
NIP. 197904012003121003



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Rahma Fitri Ningsih, No. BP 1910842025, Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Kebijakan PPDB Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2022, dibimbing oleh: Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan PPDB tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh agenda rutin pengawasan yang dilakukan Ombudsman setiap tahunnya karena PPDB merupakan pelayanan yang paling banyak di akses masyarakat, dan merupakan bagian dari pelayanan dasar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan triangulasi sumber data. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi model Merilee S. Grindle dengan dua variabel, yaitu *Content of Policy* dan *Context of Implementation*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kekurangan pada variabel *Content* yaitu indikator *resources committed*, dimana sumber daya manusia dan finansial belum mencukupi meskipun kegiatan pengawasan ini sudah berjalan beberapa tahun. Akibatnya, pengawasan langsung dan pengawasan yang dilakukan di luar Kota Padang belum berjalan maksimal karena dukungan dari sumber daya manusia dan finansial yang kurang. Namun demikian, dari adanya pelaksanaan pengawasan terhadap PPDB ini memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pelayanan publik pada PPDB serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan PPDB ini dan memastikan agar pelaksanaan PPDB ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, PPDB, Sumatera Barat

ABSTRACT

Rahma Fitri Ningsih, No. BP 1910842025, Implementation of Supervisory Function of Ombudsman Representing West Sumatera on the Implementation of the 2022 PPDB Policy in West Sumatera Province. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Andalas University, Padang, 2023, guided by: Muhammad Ihsan Kabullah, S.IP, M.PA and Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.sc.

This research aims to describe how the Ombudsman Representing West Sumatera supervision of the 2022 PPDB policy in West Sumatera is implemented. This research was set up by the Ombudsman's regular monitoring agenda every year due to PPDB is the most widely accessed public service in the community, and also PPDB is part of basic service.

This study uses a qualitative-descriptive method. Data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The selection of informants was carried out using a purposive sampling method, with triangulation of data sources. The theory of policy implementation used is the implementation theory of the Merilee S. Grindle model with two variables, namely Content of Policy and Context of Implementation.

Based on the results of the research that has been carried out, it was found that the implementation of supervision of the Ombudsman Representative of West Sumatra has been going well, but there are deficiencies in the Content variable, namely the committed resources indicator, where human and financial resources are insufficient even though this monitoring activity has been running for several years. As a result, direct supervision and supervision carried out outside the city of Padang have not run optimally because of the lack of support from human and financial resources. However, the existence of the implementation of supervision of PPDB has had a good impact on improving public services at PPDB as well as minimizing violations that occur in the implementation of this PPDB and ensuring that the implementation of PPDB is in accordance with established policies.

Keywords: Implementation, Controlling, PPDB, West Sumatera